



PENGARUH GERAKAN #MeToo TERHADAP PERUBAHAN KEBIJAKAN PELECEHAN SEKSUAL DI AMERIKA SERIKAT TAHUN 2017-2022

Balqis Amini Naisa¹, Sri Muryantini²,

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Politik/ Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta

²Fakultas Ilmu Sosial dan Politik/ Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta

*Email : 151190127@student.upnyk.ac.id

Email : sri.muryantini@upnyk.ac.id / srimuryantini03@gmail.com

Abstrak

Pelecehan seksual merupakan sebuah permasalahan yang besar di Amerika Serikat, melihat jumlah kasus yang terus naik setiap tahunnya. Kurangnya perhatian dari pemerintah dan pihak berwenang terkait serta minimnya kesadaran masyarakat menjadikan isu ini kurang mendapatkan perhatian khusus. Gerakan #MeToo yang lahir pada tahun 2006 muncul kembali di tahun 2017 melalui unggahan twitter milik aktris Hollywood yang diharapkan mampu menimbulkan kesadaran publik akan isu pelecehan seksual. #MeToo berhasil membuktikan bahwa mereka mampu memberikan dampak positif ini dengan munculnya banyak dukungan dari pihak luar yang membantu advokasi dari gerakan ini dan mendorong pemerintah Amerika Serikat untuk mengubah kebijakan mereka mengenai pelecehan seksual. Skripsi ini akan menganalisa bagaimana pengaruh gerakan #MeToo dalam mengubah kebijakan mengenai pelecehan seksual di Amerika Serikat. Metode penelitian yang digunakan yakni kualitatif eksplanatif, dengan sumber data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Pengaruh yang diberikan dari gerakan #MeToo akan dianalisis dengan teori *Transnational Advocacy Network* yang menjabarkan strategi dan faktor pendorong dalam keberhasilan gerakan advokasi. Keberhasilan ini didorong oleh faktor *boomerang pattern* dan strategi yang digunakan yaitu *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics*, dan *accountability politics*.

Kata kunci: *me too*, gerakan #MeToo, pelecehan seksual, *transnational advocacy network*, Amerika Serikat

Abstract

Sexual harassment is a big problem in the United States, seeing the number of cases that continue to increase every year. The lack of attention from the government and related authorities as well as the lack of public awareness makes this issue receive less special attention. The #MeToo movement which was born in 2006 reappeared in 2017 through Twitter uploads belonging to Hollywood actresses which are expected to be able to raise public awareness of the issue of sexual harassment. #MeToo managed to prove that they are capable of having this





positive impact with the emergence of a lot of support from outsiders who helped advocate for this movement and pushed the United States government to change their policies on sexual harassment. This thesis will analyze how the influence of the #MeToo movement in changing policies regarding sexual harassment in the United States. The research method used is explanatory qualitative, with data sources collected through library research. The influence of the #MeToo movement will be analyzed using the theory of the Transnational Advocacy Network which describes the strategies and driving factors in the success of the advocacy movement. This success was driven by the boomerang pattern and the strategies used, namely information politics, symbolic politics, leverage politics, and accountability politics.

Keywords : *me too, #MeToo movement, sexual harassment, transnational advocacy network, United States of America.*

Pendahuluan

Gerakan *Me Too* atau *Me Too Movement* merupakan gerakan yang terlahir karena adanya kepedulian terhadap hak perempuan dan pelecehan seksual di dunia internasional. Didirikan oleh Tarana Burke pada tahun 2006 gerakan ini bertujuan untuk membantu para korban kekerasan seksual, khususnya perempuan kulit hitam dan perempuan-perempuan lain dari golongan minoritas agar mendapatkan penanganan yang layak serta menghentikan terjadinya kekerasan seksual dimanapun itu terjadi. *Me Too movement* memiliki visi untuk melimpahkan kenyamanan, kegembiraan, sumber daya, keamanan, serta komitmen untuk penyembuhan bagi para penyintas kekerasan seksual dan berusaha mengadvokasi mereka (*MeToo*, 2023). Gerakan ini juga menuntut pertanggungjawaban dari para pelaku kekerasan seksual serta perubahan sistemik jangka panjang baik itu kebijakan ataupun hal lainnya.

Gerakan *Me Too* ini menjadi viral pada tahun 2017 ketika *The New York Times* menerbitkan artikel mengenai beberapa aktris *Hollywood* yang angkat bicara mengenai dunia gelap perfilman di Amerika Serikat dan bagaimana aktris aktris ini dilecehkan secara seksual. Berita ini menyeret nama nama besar seperti Gwyneth Paltrow bahkan Angelina Jolie (Kantor dan Adams, 2017). Artikel ini bermunculan setelah sebelumnya seorang aktris *Hollywood*, Alyssa Milano mencuit dalam akun twitternya "*If you've been sexually harassed or assaulted write 'me too' as a reply to this tweet.*" Dengan tagar/hashtag '#MeToo' cuitan tersebut mendapat banyak atensi dari dunia dan Gerakan *MeToo* ini menjadi semakin viral. Baik dari





kalangan *Hollywood*, perfilman, aktris, warga biasa, laki-laki, maupun perempuan, para korban pelecehan serta kekerasan seksual ini mengeluarkan suara mereka dalam cuitan lain dibawah cuitan Alyssa dengan tagar yang sama yakni *#MeToo*.

Gerakan ini merambah pada negara negara lain seperti Arab Saudi, Jerman, serta Italia hingga ke Asia seperti Cina. Tagar *#MeToo* menjadi tren di twitter di lebih dari 85 negara. Gerakan ini memiliki dimensi internasional dimana gerakan ini tidak terbatas dengan satu negara saja namun membentuk jejaring antar bangsa. Tagar ini menyadarkan masyarakat bahwa pelecehan terhadap perempuan mampu terjadi di mana saja dan kapan saja bahkan dalam keadaan apapun. Karena pada dasarnya gerakan awal ini terbentuk dengan tujuan untuk menyediakan dukungan dan pengakuan bahwa perempuan yang mengalami pelecehan seksual ini benar adanya, meskipun awalnya gerakan ini dibentuk untuk perempuan Afro-Amerika saja. Ramainya tagar ini hingga ke seluruh penjuru dunia menjadi bukti bahwa *#MeToo* bukanlah hanya sebuah kelompok jejaring sosial saja namun juga merupakan sebuah berita utama yang melibatkan banyak suara yang mencoba untuk menentukan, menegaskan bukti kekerasan dan pelecehan seksual ini benar dan nyata adanya (Karen, 2019).

Pelecehan seksual sendiri bukanlah hal yang baru atau dianggap tabu saat ini. Pelecehan seksual dijelaskan sebagai hubungan seksual yang tidak diinginkan atau pemaksaan seksual, di mana dalam sejarah hal ini sudah mengakar dalam konteks perbudakan yang dialami oleh perempuan (Siegel, 2003). Banyak definisi yang menjelaskan mengenai kata pelecehan seksual yang poinnya yakni mengenai perilaku pemaksaan dan tidak diinginkan dengan unsur seksual, di mana pemaksaan ini termasuk pada pelanggaran martabat, dan kesejahteraan pribadi dari korban. Sudah banyak kasus atau kejadian pelecehan seksual terjadi di mana saja, terutama di tempat kerja. Di Amerika Serikat pengakuan atas pelecehan seksual muncul pada tahun 1970-an, dimana pengadilan Amerika Serikat mengakui pelecehan seksual sebagai diskriminasi jenis kelamin. Jumlah kasus pelecehan seksual di Amerika Serikat angkanya cenderung meningkat setiap tahunnya, tercatat ditahun 2018 sekitar 26% perempuan dan 19,3% laki-laki dari total 331.780.264 penduduk Amerika Serikat pernah diperkosa setidaknya satu kali dalam hidupnya (Rahagi, 2019).

Amerika Serikat mencatat angka pelecehan dan kekerasan seksual yang sangat tinggi.





Portal statistik yang berbasis di New York, Statista, mencatat pada tahun 2017, kasus pemerkosaan di Amerika Serikat mencapai angka 99,856 kasus (Dogantekin, 2019). Organisasi anti kekerasan seksual yang berbasis di Washington D.C., yakni *Rape, Abuse, & Incest National Network* (RAINN) mencatat hal yang lebih kelam, yakni bahwa kasus kekerasan seksual di Amerika Serikat terjadi setiap 68 detik. Bahkan setiap 9 menit ada anak-anak sebagai korban kekerasan seksual. RAINN juga menyatakan bahwa 90% dari korban pemerkosaan di Amerika Serikat merupakan seorang perempuan (RAINN, 2022).

Department of Justice, Bureau of Justice Statistics mencatat rata-rata jumlah korban pelecehan seksual setiap tahunnya di Amerika Serikat ada 463,634 korban bagi korban di atas 12 tahun. Bahkan, di tahun 2018 tercatat ada 734,630 orang mengalami pemerkosaan termasuk pelecehan, dan percobaan pemerkosaan di Amerika Serikat. Berdasarkan catatan dari *National Sexual Violence Resource Center* (NSVRC) kasus-kasus pelecehan dan pemerkosaan tersebut mayoritas tidak dilaporkan kepada polisi. Di tahun 2017 terdapat 40% kasus pelecehan dan pemerkosaan di Amerika Serikat yang dilaporkan ke polisi, namun angka itu menurun di tahun 2018 ketika hanya 25% kasus yang dilaporkan (NSVRC, 2022).

Di Amerika Serikat sendiri sebelum adanya gerakan *#MeToo* sulit untuk menuntut atau menindaklanjuti pelaku kejahatan seksual. Sulitnya memunculkan kesadaran bahwa pelecehan seksual ini benar adanya adalah salah satu faktor, seperti yang diketahui di Gedung Putih sendiri sudah ada seorang petinggi yang menerima lusinan pengaduan pelanggaran seksual yang ditujukan kepadanya namun tetap saja terpilih. Tuntutan yang diperjuangkan oleh korban kerap tidak ditindaklanjuti dan tidak ditangani secara serius. Bahkan, tercatat hanya 310 kasus dari 1000 kasus yang dilaporkan, hal ini berarti 2/3 kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual tidak dilaporkan oleh korban (RAINN, 2022).

Gerakan *#MeToo* dipercaya menjadi gerakan yang mampu memicu perubahan dalam sistem yang berjangka panjang. Gerakan ini dianggap sebagai gerakan yang mampu meningkatkan kesadaran kontemporer dan membuka mata dunia serta memberikan perhatian khusus terhadap pelecehan, memicu publik untuk percaya dan mendukung para korban serta menumbuhkan kesadaran banyak organisasi untuk menanggapi tuduhan pelecehan seksual





dengan langkah yang serius (Rosewarne, 2019). Di Amerika Serikat sendiri, momentum gerakan ini mendorong peningkatan jumlah pelaporan kasus pelecehan seksual, kekerasan seksual, dan pemerkosaan dari berbagai bidang industri. Tidak hanya di industri hiburan dan perkantoran, Lembaga Kongres AS juga mendapati munculnya laporan pelanggaran seksual terhadap 59 senator dan DPR. Media nasional juga meliput mengenai gerakan *#MeToo*, bahkan persentase liputannya lebih dari 35 persen. Momentum *#MeToo* yang menjadi viral mampu mendorong gerakan *MeToo* terdahulu yang kurang mendapatkan perhatian publik kini telah dikenal masyarakat luas terkhusus pada media nasional AS. Tidak hanya berdampak pada tingkat pelaporan pelecehan seksual saja namun gerakan ini mampu meningkatkan hak perempuan di bidang politik juga, banyak perempuan yang sejak pemilihan tahun 2018 telah terpilih menjadi senat bahkan jumlahnya mencapai 22 orang dan terus meningkat (Vogelstein dan Stone, 2021). Selain pada jumlah perempuan di kursi senat gerakan ini juga mengubah dan memunculkan beberapa rancangan kebijakan baru yang mendukung perempuan terutama di lingkungan bekerja.

Munculnya kebijakan mengenai pelecehan seksual ini dikarenakan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kasus pelecehan seksual. Hal ini terbukti dari diperkenalkannya lebih dari 125 undang – undang tentang pelecehan seksual di 32 negara bagian di Amerika Serikat pada tahun 2018. Beberapa diantaranya yakni diperkenalkannya RUU amandemen atau pengganti yang mereformasi UU *Congressional Accountability Act of 1995*. RUU baru ini diajukan dalam S.3749 (115TH): *Congressional Accountability Act of 1995 Reform Act* pada tanggal 13 Desember 2018 dan telah disahkan satu minggu kemudian pada tanggal 21 Desember 2018 (GovTrack, 2018).

Rancangan Undang Undang terbaru yang berhasil disetujui oleh Kongres Amerika Serikat yakni pada tahun 2022. Di mana RUU ini berisi jaminan bagi semua orang yang mengalami pelecehan seksual di tempat kerja untuk mendapatkan bantuan di pengadilan, dan melarang kontrak kerja yang memaksa orang-orang untuk menyelesaikan kasus pelecehan seksual dengan jalur mediasi. (The Guardian, 2022). RUU ini berhasil disahkan dengan hasil suara 335 setuju melawan 9 suara menolak.

Hampir bersamaan dengan pengesahan RUU di awal tahun 2022, telah diajukan juga





Rancangan Undang - Undang baru yang diharapkan dapat disahkan guna mengotorisasi ulang undang undang *Violence against Women Act*, RUU ini diklaim sudah mendapatkan 60 suara yang diperlukan untuk memenuhi syarat disahkan di senat (Karni, 2022). Meningkatnya atensi publik terhadap gerakan ini menimbulkan kesadaran masyarakat terhadap isu pelecehan seksual. Sehingga, memunculkan upaya masyarakat untuk mendorong pemerintah AS membuat kebijakan yang lebih serius untuk melindungi korban pelecehan seksual dan memberikan hukuman setimpal bagi pelaku. Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya maka tujuan dari penelitian ini adalah menjawab rumusan masalah yakni: Bagaimana pengaruh gerakan *#MeToo* terhadap perubahan kebijakan mengenai pelecehan seksual di Amerika Serikat pada tahun 2017-2022?

Kajian Pustaka

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijelaskan, maka akan digunakan kerangka berpikir teori *Transnational Advocacy Network* (TAN) milik Margaret Keck dan Kathryn Sikkink. Keck dan Sikkink menjelaskan TAN sebagai sebuah jaringan yang terdiri dari aktor-aktor internasional yang bekerja terhadap suatu isu, yang diikat bersama oleh nilai-nilai bersama, wacana bersama, dan pertukaran informasi serta layanan yang padat (Keck dan Sikkink, 1999). Landasan teori yang digunakan disini merupakan teori yang dijelaskan oleh Keck dan Sikkink dalam jurnalnya "*Transnational Advocacy Networks in International and Regional Politics*". Jaringan advokasi transnasional ini banyak terjadi di area isu yang ditandai oleh banyaknya konten atau isu bernilai tinggi, seperti hak asasi manusia, perempuan dan kesetaraan gender, isu kesehatan, isu lingkungan, dan masyarakat adat. Aktor aktor yang terlibat bisa berasal dari dalam negeri atau aktor komunitas domestik, bisa juga sebuah aktor internasional seperti *international non-government organization* (INGO) dan *international government organization* (IGO). Beberapa contohnya seperti; organisasi penelitian dan advokasi, gerakan sosial lokal, komunitas tempat ibadah, serikat pekerja, organisasi konsumen, para kaum intelektual, bagian dari organisasi antar pemerintah regional dan internasional, dan bagian dari cabang pemerintah eksekutif dan/atau parlemen.





Dalam penelitian ini Teori *Transnational Advocacy Network* dapat menjelaskan mengenai gerakan #*Metoo* dan bagaimana pengaruhnya terhadap berbagai lapisan, dimana gerakan ini berhasil mengadvokasi dan bergerak secara transnasional yang mampu mencakup berbagai aktor didalamnya, terkhusus beberapa organisasi perempuan atau feminis yang fokus membawa satu isu yakni mengenai pelecehan seksual terutama pelecehan seksual yang terjadi di tempat kerja. Dengan adanya advokasi yang dijalankan mampu menumbuhkan isu pada komunitas komunitas terutama yang belum atau kurang memperhatikan mengenai pelecehan seksual ini. Seperti yang sudah diketahui bahwa biasanya hanya pemerintah negara atau aktor tradisional saja yang memiliki hak untuk merumuskan atau membuat kebijakan mengenai hal yang beredar di masyarakatnya, namun pada beberapa keadaan tertentu kelompok advokasi bisa masuk ke area politik ini. Hal seperti ini bisa terjadi terlebih ketika hubungan antara pemerintah negara dengan rakyat tidak dalam kondisi yang baik, maka kelompok advokasi dengan jaringan internasional yang luas seperti inilah yang kemudian masuk dan mengubah pola pikir suatu negara.

Metode advokasi yang digunakan oleh TAN mampu membingkai masalah secara tepat dan dengan mudah bisa menarik perhatian khalayak ramai. Dengan perhatian yang besar tersebut mendorong tindakan kolektif dengan bersama sama memahami isu yang ada. TAN secara aktif terus mencari cara untuk meramaikan isu isu untuk menarik perhatian aktor tradisional sehingga aktor ini mampu terlibat dalam proses pembuatan keputusan. Cara TAN mempengaruhi khalayak internasional sama dengan bagaimana sebuah kelompok politik atau gerakan sosial melakukan hal tersebut. Metode advokasi TAN ini berkembang dalam beberapa cara, terkadang mereka merencanakan pertemuan aktivis yang berpikiran sama serta di lain waktu mereka mengembangkan isu tertentu dengan kontak kontak yang tersedia. Kelompok kolektif kecil akan melakukan kampanye mengenai isu tertentu serta bergabung dengan aktor lainnya. Kelompok lokal biasanya akan menjangkau organisasi dan simpatisan internasional (Kiel, 2011).

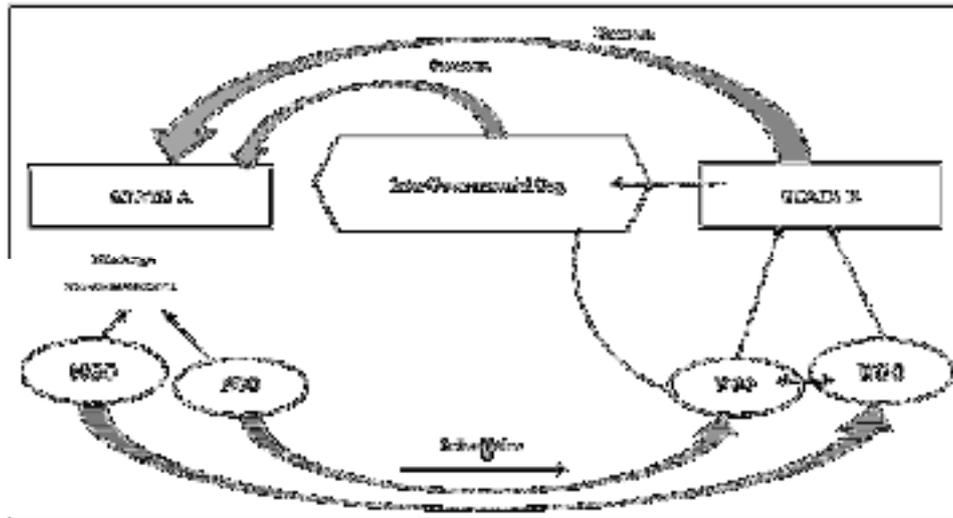
Munculnya TAN didasari oleh beberapa faktor yakni *boomerang pattern*, *activist* atau disebut juga *political entrepreneurs* dan terakhir *international conferences*. '*Boomerang pattern*' atau Pola Bumerang merupakan ciri khas dari TAN di mana tujuan kegiatan mereka





adalah untuk mengubah pola pikir serta perilaku suatu bangsa (Keck dan Sikkink, 1999).

Gambar 1. Boomerang Pattern



sumber: Margaret E. Keck, Kathryn Sikkink. 1999. "Transnational Advocacy Networks in International and Regional Politics". *International Social Science Journal*. Vol. 51. No. 159. Hal. 94

Gambar I.1 diatas menjelaskan bahwa *Boomerang Pattern* ini terjadi ketika kelompok lokal tidak mendapatkan akses untuk mengajukan isu mereka pada institusi pemerintahan. Sehingga mereka membentuk jaringan transnasional atau koneksi secara internasional yang tujuannya mampu menekan negara mereka melalui aktor di luar negara (Keck dan Sikkink, 1999). Seperti yang dijelaskan oleh Keck dan Sikkink bahwa pola boomerang dari jaringan advokasi internasional ini terjadi ketika arus komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat lokal terputus sehingga masyarakat lokal tidak dapat mengakses atau memberikan tuntutan mereka ke institusi resmi negara dalam suatu masalah. Dukungan dari koneksi internasional ini kemudian digunakan oleh gerakan lokal untuk memberikan tekanan pada negaranya, tekanan yang diberikan dapat berupa hal yang berkaitan dengan kebijakan ataupun perilaku sebuah negara mengenai isu tersebut.

Menurut Keck dan Sikkink Jaringan advokasi memiliki empat tipologi taktik atau strategi untuk mencapai tujuan mereka yakni *Information Politics*, *Symbolic Politics*, *Leverage Politics*, dan *Accountability Politics* (Keck dan Sikkink, 1999). Selain dengan empat strategi





yang telah disebutkan, Keck dan Sikkink juga mengidentifikasi beberapa tahapan pengaruh TAN. Yang pertama yakni munculnya isu atau masalah dan pengaturan agenda. Yang kedua yakni pengaruh posisi negara serta organisasi baik regional maupun internasional. Ketiga, pengaruh pada prosedur kelembagaan. Keempat, pengaruh yang ada bagi perubahan kebijakan yang dilakukan oleh aktor target, yang mana bisa negara atau organisasi tertentu. Dan yang terakhir yakni pengaruh perilaku atau sifat negara tersebut (Keck dan Sikkink, 1999).

Dalam sebuah kampanye jaringan, untuk mengadvokasi dan mengejar keberhasilan dapat digunakan taktis atau strategi yang telah dijelaskan. Strategi advokasi yang telah dijelaskan ini mampu membantu peneliti untuk menjelaskan bagaimana sebuah gerakan #MeToo yang memiliki jaringan transnasional ini dapat mempengaruhi kebijakan di Amerika Serikat. Dan dalam upaya ini tentunya akan dicapai sebuah keberhasilan yang dapat ditentukan dengan tahapan pengaruh pada teori *Transnational Advocacy Network*. Sebagaimana telah dijelaskan mengenai teori *Transnational Advocacy Network* maka terdapat empat strategi yang nantinya akan menjawab penelitian in.

Metode

Metode Penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif. Menurut John W. Creswell penelitian kualitatif merupakan sebuah pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna (*meaning*) yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial dan kemanusiaan (Creswell, 2013). Penelitian kualitatif mengumpulkan sumber data dengan menggunakan studi kepustakaan, dimana berkaitan dengan strategi analisis bukan berdasarkan data numerik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat eksplanatif, yang berarti penelitian akan menjelaskan hal atau tindakan dibalik suatu fenomena yang terjadi. Adapun Tehnik Pengumpulan Data yang digunakan adalah melalui Studi Pustaka (*library research*) dengan pengumpulan informasi dan data penelitian melalui buku-buku, jurnal, penelitian terdahulu dan sumber lain yang masih berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Sumber data yang diolah bersumber dari data sekunder. Data-data yang ditemukan kemudian akan dianalisis menggunakan teori *Transnational Advocacy Network* (TAN) milik Keck





dan Sikkink. Keck dan Sikkink menjelaskan pengaruh dari jaringan advokasi seperti gerakan #MeToo ini dapat diraih dengan menerapkan empat strategi yakni *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics*, dan *accountability politics*.

Hasil dan Pembahasan

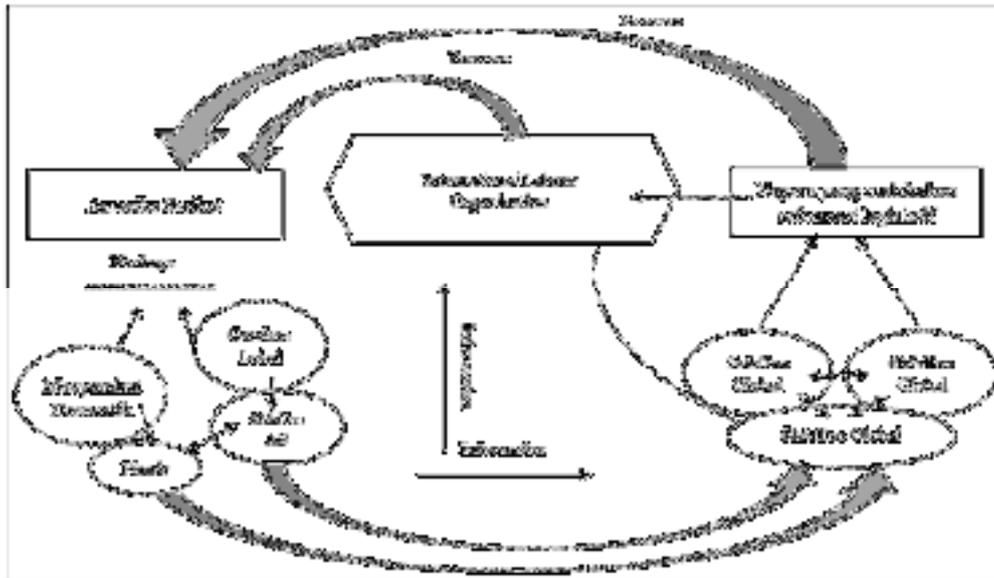
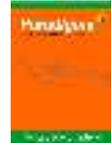
a. Boomerang Pattern

Boomerang Pattern atau Pola Bumerang adalah strategi dimana kelompok–kelompok baik lokal maupun individu memiliki klaim atas isu atau masalah tertentu, yang mana isu tersebut tidak mendapat respon positif dari pemerintah setempat sehingga kelompok-kelompok ini mencari dukungan dengan membentuk jaringan transnasional bersama koneksi internasional. Kontak internasional ini bertujuan sebagai pendorong untuk memperkuat permintaan kelompok lokal dan membuka ruang diskusi bagi isu dan masalah baru ini, yang kemudian mengembalikan suara dari isu dan masalah ini ke wilayah domestik (Keck dan Sikkink, 1999).

Ketika ada sebuah kelompok atau Non-Governmental Organization (NGO) lokal yang memiliki isu penting namun terhalang aksesnya terhadap pemerintah, maka muncul pola bumerang tadi, yang mana NGO lokal ini akan mencari koneksi atau aliansi pada dunia internasional untuk mendapatkan dukungan atas isu mereka yang nantinya dapat memberikan tekanan pada negaranya. Tekanan tersebut dapat berasal dari negara lain yang sudah melaksanakan tuntutan dari NGO tersebut, bisa juga kelompok atau organisasi ketiga seperti InterGovernmental Organization. Maka, tekanan yang berasal dari luar tadi dapat menarik perhatian pemerintah negara tersebut, yang bisa membuka arena diskusi dan akhirnya membawa tuntutan tersebut kembali pada tingkat domestik.

Gambar 2. *Boomerang Pattern* dalam Gerakan #MeToo





Sumber: diolah dari Margaret E. Keck, Kathryn Sikkink. 1999. "Transnational Advocacy Networks in International and Regional Politics". *International Social Science Journal*. Vol. 51. No. 159. Hal. 94.

Gambar 2 menjelaskan bagaimana *boomerang pattern* pada gerakan #MeToo ini terjadi. Pada masalah ini inti permasalahan muncul dari berkembangnya gerakan #MeToo di Amerika Serikat, maka pada *boomerang pattern* ini Amerika Serikat diidentifikasi sebagai 'State A'. Lalu, masalah yang sedang diadvokasikan kepada 'State A' adalah masalah pelecehan seksual di tempat kerja. Masalah yang muncul ini imbas dari sistem hukum Amerika Serikat yang dianggap kurang dalam menangani kasus pelecehan seksual. Rendahnya jumlah pelaporan kasus pelecehan seksual kepada pihak berwenang ini menunjukkan adanya suatu kejanggalan dan masalah pada sistem hukum yang menangani kasus pelecehan seksual di Amerika Serikat. Jalur komunikasi antara individu atau kelompok lokal dengan pemerintah akan dianggap terputus apabila hukum yang harusnya menangani suatu masalah tidak berjalan efektif dan tidak ada respon positif dari pemerintah (Keck dan Sikkink, 1999). Muncullah aktor dari luar jangkauan lokal sebagai akibat dari kurangnya respon pemerintah tadi, aktor ini mengeluarkan ide dan mendorong agar pemerintah memberikan perhatian pada persoalan tersebut.

Dalam permasalahan ini ide yang dibawa oleh aktor di luar gerakan lokal yakni gerakan #MeToo di media sosial. Ide ini dibawa oleh seorang aktor di luar gerakan lokal yakni seorang





individu dari Amerika Serikat sendiri, Alyssa Milano. Membawa gebrakan baru dengan adanya tagar/hashtag #MeToo ini, Alyssa membawa wacana untuk membangun kesadaran masyarakat mengenai pelecehan seksual menjadi sebuah wacana di level global. Alyssa berusaha menunjukkan bagaimana masalah ini memiliki urgensi yang penting untuk dibahas, sekaligus mencari dukungan melalui perluasan isu ini. Hal ini menunjukkan bagaimana aktor yang visioner berusaha memunculkan strategi dan aksi politik bagi masalah yang tidak terselesaikan, yang mana ini berpotensi menjadi sebuah jaringan aksi transnasional (Keck dan Sikkink, 1999). Potensi ini didukung dengan bagaimana aktor aktor terlibat mencoba memajukan isu yang mereka bawa menjadi *headline* berita sehingga mudah menarik perhatian dari aktor yang lebih tinggi yang ingin dituju. Memajukan isu #MeToo menjadi berita utama di berbagai kanal berita merupakan sebuah bentuk langkah awal dari advokasi gerakan ini supaya mendapatkan perhatian dari pemerintah Amerika Serikat. Aktivis #MeToo secara aktif terus menaikkan isu mereka baik dengan kampanye inovatif ataupun mencari tempat yang cocok dan ramah untuk kegiatan advokasi mereka.

Masifnya para aktor yang tergabung dengan gerakan #MeToo secara internasional ini berhasil menyalurkan advokasi mereka melalui gerakan #MeToo yang independen di beberapa negara. Beberapa gerakan tersebut adalah #NiUnaMenos di Argentina, #TheFirstTimeIGotHarassed di Mesir, #WithYou di Jepang, #BalanceTonPorc di Perancis, #PremeiroAssedio di Brazil, dan beberapa negara lain (MacKinnon, 2019). Hal ini menunjukkan bagaimana aliansi lintas negara ini berhasil untuk mengadvokasi tujuan dari gerakan #MeToo. Jaringan transnasional juga menargetkan sebuah negara yang berpotensi kuat dapat memberikan tekanan secara politik dalam *boomerang pattern*. Untuk mengidentifikasi negara yang mampu menjadi 'State B' yang memberikan penekanan pada negara asal maka dapat dilihat melalui bagaimana negara tersebut meningkatkan kesadaran mereka melalui reformasi secara legal atau munculnya kebijakan yang terjadi di beberapa negara di sebagai akibat dari gerakan #MeToo.

Reformasi legislatif telah dilakukan di beberapa negara yang menjadi dampak dari merebaknya gerakan #MeToo. Seperti Perancis yang mengesahkan RUU tentang pelecehan seksual yang lebih komprehensif pada Agustus 2018 (Stone dan Vogelstein, 2019). Di Korea





Selatan juga mengalami hal yang sama, pemerintah Korea Selatan turut memperkenalkan regulasi mereka yang lebih ketat mengenai pelecehan seksual pada Mei 2019 (Jumabhoy, 2019). Munculnya negara-negara yang mulai melakukan reformasi legislatif mereka secara tidak langsung memberikan tekanan pada pemerintah Amerika Serikat untuk memberi respon dengan mengubah kebijakan mereka menjadi lebih komprehensif dan juga ikut melakukan reformasi legislatif terhadap kebijakan mereka.

Selain negara negara yang telah melakukan reformasi legislatif, peran dari *InterGovernmental Organization* (IGO) sebagai aktor yang kuat secara politik juga diperlukan untuk menekan Amerika Serikat selaku 'State A'. Pada kasus ini IGO yang paling kompatibel menangani masalah pelecehan di tempat kerja adalah *International Labour Organization* (ILO). Pada tahun 2018, ILO mengadakan konferensi dalam *International Labour Conference* (ILC) yang mana menghasilkan konvensi baru serta rekomendasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memerangi pelecehan seksual di lingkungan kerja. ILC diadakan setiap tahun di bulan Juni, di mana pada tahun 2018 pembahasan mengenai masalah pelecehan seksual ini mulai dibahas pada sesi ke-107 ILC (International Labour Organization, 2019). Pada pertemuan tersebut belum terbentuk konvensi secara resmi sesuai hukum internasional, baru terbentuk teks usulan dan rekomendasi standar untuk mengakhiri pelecehan di tempat kerja. Pembahasan dilanjutkan pada pertemuan tahun berikutnya yakni Juni 2019, di mana pada sesi ke-108 ILC berhasil mengadopsi '*The Violence and Harassment Convention 2019*' dan '*Violence and Harassment Recommendation 2019*' melalui *The Centenary International Labour Conference* pada 21 Juni 2019 (International Labour Organization, 2019).

Dengan dihasilkannya rekomendasi ini, maka ILO akan mewajibkan negara-negara anggotanya untuk segera meratifikasi undang-undang mengenai penanganan pelecehan di tempat kerja. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendesak pemerintah Amerika Serikat sebagai anggota ILO untuk juga ikut meratifikasi dan mereformasi undang-undang mereka mengenai pelecehan seksual terutama di tempat kerja. Maka, *boomerang pattern* dalam permasalahan gerakan #MeToo ini dapat ditunjukkan dengan berhasilnya upaya gerakan #MeToo untuk mengumpulkan dukungan secara kolektif melalui aliansi internasional untuk





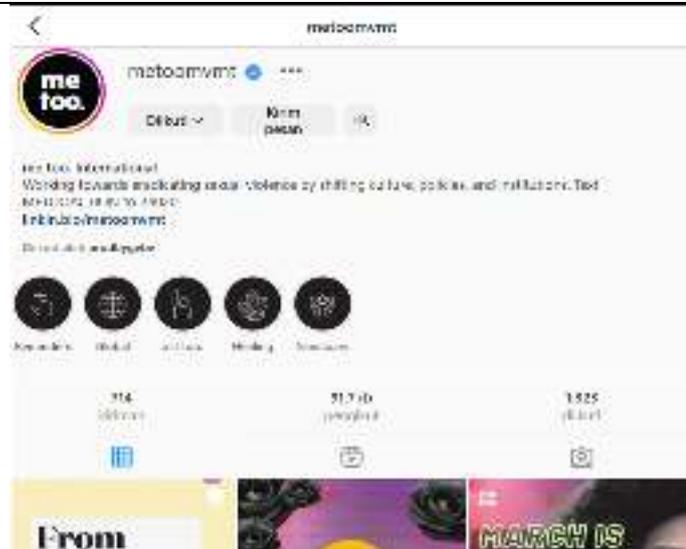
menekan Amerika Serikat sebagai ‘*State A*’ melalui tekanan dari IGO yakni ILO, dan NGO yakni gerakan *#MeToo* secara global.

b. Information Politics

Information Politics adalah kemampuan untuk memindahkan informasi secara cepat yang dapat berguna secara politik dan memiliki kredibilitas setempat yang dapat memberikan pengaruh yang lebih kuat (Keck dan Sikkink, 1999). Pertukaran informasi ini dapat dilakukan melalui banyak sarana seperti telepon, surat kabar, media massa, bulletin, bahkan media sosial. Informasi merupakan hal yang sangat krusial di gerakan *#MeToo* ini. Terutama gerakan ini telah menyebar dan mengadvokasi secara global, sehingga informasi menjadi kunci penting bagi gerakan ini. Aktivitas aktor non-negara seperti gerakan advokasi transnasional sangat bergantung pada sebuah informasi karena mereka tidak memiliki akses politik resmi seperti negara, sehingga mereka tidak memiliki sesuatu yang disebut *power*, baik tradisional seperti militer maupun *power* secara ekonomi (Keck dan Sikkink, 1999). Oleh karena itu, informasi sangatlah penting bagi aktivitas mereka, hal ini memperluas legitimasi mereka dan membantu mereka untuk memobilisasi target kebijakan tertentu. Mereka terus berusaha untuk mengadvokasi masyarakat, juga berusaha menghasilkan informasi dengan cepat dan akurat serta mampu membagikannya secara efektif supaya isu mereka mendapatkan perhatian dan menjadi pembahasan bagi aktor yang memiliki akses pada aktor yang lebih kuat. Keberhasilan mobilisasi dari gerakan *#MeToo* tercipta dari peranan media sosial sebagai perantara informasi.

Gambar 3. Akun Instagram Gerakan *metoo*





Sumber: Instagram. 2023. <https://www.instagram.com/metoomvmt/>. Diunduh pada 9 Maret 2023.

Gambar 3 memperlihatkan akun instagram dari *metoo movement*. Informasi yang dibagikan tidak hanya melalui media sosial twitter saja, namun juga dengan media sosial lainnya seperti Instagram. Saat ini Instagram menjadi salah satu platform media sosial yang paling banyak digunakan. Maka, dengan membagikan informasi terbaru mengenai *#MeToo* melalui Instagram diharapkan mampu menjangkau audiens lebih banyak.

Arus informasi pada sebuah jaringan advokasi transnasional tidak hanya menyediakan fakta saja, tetapi juga kesaksian cerita dari individu dengan permasalahan yang sama sehingga para aktivis dapat membujuk dan memotivasi publik untuk turut serta mengambil tindakan. Hal ini merupakan informasi testimonial yang mana digunakan untuk mencapai informasi teknis atau statistic (Keck dan Sikkink, 1999). Tujuan dari informasi testimonial yakni untuk membuat publik mengerti serta memahami akan fakta dan kesaksian mengenai keadaan yang sedang terjadi dan membuat opini publik baik sesuai dengan letak geografinya atau bahkan tidak sesuai letak geografinya (Keck dan Sikkink, 1999). Sehingga mampu mempersuasi publik untuk ikut memperjuangkan isu dari jaringan advokasi tersebut. Informasi testimonial yang dibagikan di berbagai media masa ini berhasil menyita perhatian media, bahkan angka liputan media mengenai gerakan *#MeToo* dan pelecehan seksual terus meningkat. Hal ini yang secara tidak





langsung meningkatkan frekuensi masyarakat dalam membicarakan isu pelecehan seksual.

Tidak hanya membagikan informasi melalui media saja, gerakan *#MeToo* juga mengadvokasikan gerakan mereka melalui *website* milik *metoo movement* dengan membagikan informasi terbaru mengenai gerakan ini, yang mana dapat diakses oleh berbagai kalangan, baik lokal maupun internasional

Gambar 4. *Website Resmi Gerakan metoo*



Sumber: *me too*. 2023. <https://metoomvmt.org/>. Diunduh pada 8 Maret 2023

Gambar 4 memperlihatkan tampilan *website* resmi *metoo*, yang mana *website* ini membagikan informasi seperti organisasi atau sumber daya nasional yang ikut berperan membantu memberikan pelayanan bagi korban pelecehan seksual di berbagai negara bagian di Amerika Serikat. Terdapat bagian *stay informed* pada *website me too* yang mana menyediakan informasi dan berita terbaru mengenai gerakan *#MeToo*. Disediakan juga kontak bagi para penyintas yang membutuhkan sumber bantuan, selain itu, dilampirkan laporan tahunan dari gerakan *#MeToo* yang berisi tentang pertumbuhan gerakan *#MeToo*, beserta programnya dan asal pendapatan mereka untuk melanjutkan kampanye ini. *Website* ini diharapkan menjadi tujuan paling pertama bagi para masyarakat yang ingin mencari tahu mengenai pembaruan dari gerakan ini.

Setelah besar melalui *hashtag #MeToo* dan menyediakan informasi lebih melalui *website*





metoo, kampanye gerakan #*MeToo* yang berhasil meluas ke penjuru dunia ini mendapat bantuan dari Google. Google melalui *website* nya dengan proyek *Google Rising (Me Too Rising)* yang memetakan informasi yang memvisualisasi tren pencarian untuk berada di sekitar pencarian #*MeToo* (Buxton, 2019).

Gambar 5. Pemetaan Informasi Gerakan #*MeToo* Melalui *Me Too Google Rising*



Sumber: *Me Too Rising*. 2023. <https://metoorising.withgoogle.com/>. Diunduh pada 8 Maret 2023.

Pada gambar 5 dapat terlihat catatan tren pencarian mengenai #*MeToo* sejak Oktober 2017 hingga hari ini. Pemetaan ini dapat melihat tren gerakan #*MeToo* di waktu tertentu yang tertera pada *website*. *Me Too Rising website* juga memberikan informasi wilayah dengan tren #*MeToo* paling banyak dibicarakan. Selain menyediakan informasi tren pencarian #*MeToo*, tersedia juga informasi sumber daya dan bantuan bagi penyintas pelecehan seksual seperti *hotline* baik bagi warga Amerika Serikat maupun bagi penyintas di luar Amerika Serikat. Pemetaan oleh Google melalui *MeToo Rising* ini memiliki tujuan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi terbaru. Perbaruan informasi ini akan menciptakan getaran yang mempengaruhi para aktor aktor politik yang ikut bergabung dengan kampanye ini untuk menekan aktor negara memberikan respon mengenai isu ini.

Perhatian yang terus membesar akan gerakan #*MeToo* terus memengaruhi kesadaran publik internasional mengenai isu pelecehan seksual. Kontribusi media yang besar juga berperan besar untuk menyediakan akses informasi pada masyarakat bahkan di wilayah geografis yang





berbeda. Hal ini membantu gerakan #MeToo untuk memperluas legitimasi mereka, dan memperkuat gerakan mereka untuk sampai pada aktor yang lebih kuat.

c. Symbolic Politics

Symbolic Politics adalah kemampuan untuk memberikan kesan kuat melalui simbol, aksi, ataupun cerita yang akan menggambarkan situasi mengenai peristiwa penting terkait dengan isu atau tuntutan yang ingin mereka advokasikan, meskipun sasaran dari tujuan tersebut berada di jarak yang jauh (Keck dan Sikkink, 1999). *Symbolic politics* yang dilakukan gerakan #MeToo dapat terlihat melalui simbol '#' yang disebut dengan simbol *hashtag* atau tagar. Taktik ini terbukti berhasil dengan banyaknya perhatian dan respon publik akan kasus pelecehan seksual yang bahkan meningkatkan angka pelaporan kasus. Dengan munculnya tagar ini mendorong publik terutama penyintas pelecehan seksual untuk merasa terlindungi dan mendapatkan dukungan, mereka tidak akan lagi merasa sendirian. Hal ini memicu keberanian para penyintas untuk ikut membagikan kisah mereka terkait pelecehan seksual para unggahan dengan tagar tersebut. Adanya tagar #MeToo ini memperlihatkan bagaimana strategi ini berhasil untuk menyuarakan isu mereka guna mendorong isu mereka mencapai tujuan utamanya.

Tagar #MeToo menjadi sebuah simbol yang menggambarkan bagaimana seorang perempuan berjuang untuk menyembuhkan diri mereka dan menjadi penyintas pada kasus pelecehan seksual yang mereka alami. Adanya simbol *hashtag* ini menarik atensi publik untuk ikut aksi dengan membagikan cerita mereka pada platform twitter. Hal ini sesuai dengan bagaimana *symbolic politics* didefinisikan, yakni memberikan kesan kuat dengan simbol yakni tagar #MeToo, dan aksi serta cerita dari penyintas lain yang ikut membagikan kisah mereka. Tagar #MeToo telah berhasil menjadi simbol khusus untuk para penyintas berani menyuarakan isu mengenai pelecehan seksual di tempat kerja di seluruh dunia.

Selain tagar #MeToo, aktivis gerakan #MeToo juga menggunakan aksi yang menyita atensi dan membekas dalam ingatan publik. Bersamaan pada acara *Golden Globe Awards*, aktor dan aktris Hollywood sepakat menggunakan pakaian serba hitam guna menunjukkan solidaritas mereka terhadap kasus pelecehan seksual yang saat itu sedang menjadi perhatian publik (Lang, 2018). Selain menggunakan baju warna hitam, para aktor Hollywood ini juga turut





menyematkan pin bertuliskan *Time's Up*. Gambar di bawah memperlihatkan beberapa aktris Hollywood, yakni Reese Witherspoon, Eva Longoria, Salma Hayek, dan Ashley Judd yang menggunakan baju serba hitam untuk memberikan rasa simpati akan kasus pelecehan seksual yang sedang ramai dibicarakan.

Gambar 6. Reese Witherspoon, Eva Longoria, Salma Hayek, dan Ashley Judd Menghadiri Golden Globe Awards ke-75 dengan Dress Code Hitam



Sumber: Leanne Italie. *The Globe and Mail*. 2018. "Stars Wear Black to Golden Globes in Statement against Sexual Harassment, Gender Inequality". <https://www.theglobeandmail.com/arts/awards-and-festivals/stars-wear-black-to-golden-globes-in-statement-against-sexual-harassment-gender-inequality/article37521735/>. Diunduh pada 9 Maret 2023.

Time's Up adalah organisasi non-profit yang dibentuk untuk mengumpulkan dana sebagai bentuk dukungan bagi penyintas pelecehan seksual. Inisiatif ini dibentuk dan didukung oleh ratusan aktris Hollywood termasuk Natalie Portman, Reese Witherspoon, Emma Stone, Cate Blanchett, dan Eva Longoria, serta telah mengumpulkan sejumlah lebih dari \$13 juta dari total target \$15 juta. Dana yang dikumpulkan ini nantinya akan digunakan sebagai dana dukungan hukum bagi korban pelecehan seksual di tempat kerja terutama yang tidak mampu memenuhi pembayaran untuk membela diri mereka (BBC, 2018).

Time's Up diluncurkan tepat pada tahun baru 2018, sebagai pendamping gerakan #MeToo yang muncul dari spontanitas aktor Hollywood merespon gerakan tersebut. *Time's Up* sendiri dibentuk sebagai ungkapan menentang adanya sistem *casting couch* (sebuah kegiatan seksual





yang dilakukan oleh seseorang dalam posisi berkuasa dan berpengaruh terhadap bawahannya sebagai imbalan bagi sebuah pekerjaan, atau kemajuan karir) yang terus marak terjadi, juga perbedaan upah gender yang telah terjadi dalam waktu yang lama. Organisasi ini bermula dari pertemuan informal para pencari bakat perempuan di Los Angeles setelah isu pelecehan seksual ramai dan marak dibicarakan pada Oktober 2017. Organisasi ini berkembang pesat hingga saat ini sudah mencakup pertemuan besar di New York dan London. *Time's Up* juga ikut mempromosikan undang-undang untuk menghukum perusahaan yang mentolerir pelecehan secara terus menerus, dan melawan penggunaan perjanjian *non-disclosure* (kontrak landasan hubungan profesional yang mengikat secara hukum) untuk melindungi pelaku pelecehan seksual. Pembelaan hukum dari *Time's Up* akan dikelola oleh *National Women's Law Center's Legal Network for Gender Equality* yang nantinya akan menjadi penghubung antara korban pelecehan seksual dengan perwakilan hukum (Helmores, 2018).

Simbol '#' atau *hashtag*, *Black Dress* dan pin *Time's Up* pada *Golden Globe Awards* memperlihatkan bagaimana aktivis pada gerakan #MeToo berjuang mewujudkan tujuan mereka dengan strategi simbolik ini dan mengajak lebih banyak orang untuk turut andil dalam kampanye gerakan ini. Simbol-simbol ini sangat penting maknanya guna mendukung kemajuan serta keberhasilan dari sebuah gerakan atau ajingan advokasi, di mana simbol ini mempermudah masyarakat untuk mengenal dan mengingat akan suatu peristiwa penting tertentu.

d. Leverage Politics

Leverage Politics atau Politik Pengaruh merupakan usaha jaringan dalam mencari pengaruh melalui dukungan dari aktor yang lebih kuat sebagai langkah strategis untuk mempengaruhi aktor negara dan mencapai tujuan dari jaringan (Keck dan Sikkink, 1999). Pada sebuah jaringan advokasi diperlukan sebuah peluang politik untuk menekan aktor yang lebih kuat. Kekuatan dari lembaga atau organisasi dengan *power* yang lebih kuat dari jaringan sangat diperlukan, *power* dari lembaga-lembaga tersebut mampu mempengaruhi kemampuan praktik negara secara langsung.

Keck dan Sikkink membagi *leverage* menjadi dua jenis, yakni *moral leverage* dan *material leverage* (Keck dan Sikkink, 1999). *Moral leverage* lebih mengarah pada "*mobilization*





of shame”, dimana mobilisasi rasa malu ini ditujukan pada perilaku aktor-aktor sasaran yang terlibat. Bentuk dari *mobilization of shame* ini sudah terlihat dengan banyaknya para pejabat dan publik figure yang mengundurkan dirinya setelah mendapatkan tuduhan pelecehan seksual. *Moral Leverage* ini menunjukkan akan tingginya angka kasus pelecehan seksual oleh figur publik melihat dari banyaknya figur figur yang kehilangan pekerjaan mereka atas konsekuensi dari tindakannya. *Moral Leverage* ini bahkan juga memengaruhi PBB yang mana sebagai sebuah organisasi besar dunia. Tahun 2017, terdapat laporan kasus pelecehan seksual terhadap staf PBB di berbagai badan lembaga PBB. Beberapa organisasi besar di bawah PBB seperti *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dan *World Food Programme* (WFP) bahkan telah memberikan respon cepat dengan memecat beberapa staf pekerja yang terlibat kasus pelecehan seksual tersebut (Baachi, 2018). Adanya hal ini juga membuktikan bagaimana pengaruh moral atau *moral leverage* memberikan pengaruh yang cukup besar bahkan bagi organisasi sebesar PBB untuk berani memecat staf nya.

Bentuk tindakan tindakan yang memicu *moral leverage* tersebut mendorong pihak pihak terlibat untuk menciptakan tindakan kolektif guna menangani masalah pelecehan seksual ini, yang mana tindakan tersebut mengarah pada *material leverage*. *Material Leverage* biasanya berbentuk semacam keterkaitan isu, biasanya melibatkan uang atau barang (namun berpotensi juga termasuk suara di organisasi internasional, kantor kantor bergengsi, atau beberapa manfaat lainnya) (Keck dan Sikkink, 1999). Dalam permasalahan #MeToo ini, *material leverage* dapat diidentifikasi sebagai sebuah produk hukum yakni kebijakan politik, hal ini dapat dilihat dari tingginya jumlah kasus pelecehan seksual yang akhirnya memicu aktor-aktor yang memiliki *power* lebih akan institusi politik resmi untuk menciptakan sistem dan kebijakan hukum yang baru untuk melindungi para korban. *Material leverage* yang berupaka produk hukum pada kasus #MeToo ini telah dikeluarkan oleh beberapa aktor aktor dengan *power* yang lebih kuat, seperti ILO yang mengeluarkan standar hukum internasional bagi kasus pelecehan seksual di tempat kerja yang diadopsi dari ‘*The Violence and Harassment Convention 2019*’ dan ‘*Violance and Harassment Recommendation 2019*’. Terbukti dengan adanya *moral leverage* tadi mendorong munculnya *material leverage* yang dalam hal ini gerakan #MeToo berhasil menarik perhatian





dari lembaga besar dan memiliki kekuatan politik, seperti ILO untuk memperkuat legitimasi mereka. Hal ini menunjukkan bahwa gerakan #MeToo berhasil memengaruhi keputusan internasional melalui tindakan advokasi jaringan sehingga ILO menciptakan sebuah standar hukum baru bagi kasus pelecehan seksual terkhusus di tempat kerja.

Lalu, setelah munculnya tekanan dari pihak internasional yakni ILO, Amerika Serikat sebagai aktor negara mengeluarkan respon dalam bentuk dukungan domestik yakni dengan dikeluarkannya beberapa RUU mengenai pelecehan seksual di tempat kerja. Selain itu, adanya strategi *leverage politics* yang menghasilkan *material leverage* ini juga memunculkan organisasi *fundraising* atau pengumpul dana yang didirikan oleh para aktris Hollywood yakni *Time's Up Legal Defense Fund*.

Material leverage atau pengaruh material ini diperlihatkan oleh pemerintah Amerika Serikat dengan mengesahkan beberapa RUU yang di dalamnya mengatur mengenai pelecehan seksual dan pelecehan seksual di tempat kerja, seperti *Congressional Accountability Act of 1995 Reform Act* yang mereformasi kebijakan sebelumnya yakni *Congressional Accountability Act of 1995*. Undang-undang ini melindungi para pekerja khususnya karyawan pada cabang legislatif dari pelecehan seksual di tempat kerja. bahkan, hanya satu bulan setelah mulai ramainya gerakan #MeToo anggota kongres Amerika Serikat sudah ada yang mengajukan RUU yang diberi nama *Member and Employee Training and Oversight on Congress Act (ME TOO Congress Act)*, RUU ini dinamakan sesuai dengan nama gerakan #MeToo. RUU ini berhasil menembus senator dengan nama H.R.4396 – 115th Congress (Congress.Gov, 2017). RUU ini diajukan pada tanggal 15 November 2017 dan tepat dua minggu kemudian RUU ini telah disahkan oleh *United State House of Representatives* (Berry, 2017). Bahkan satu minggu dari disahkan kebijakan ini, tepat pada 7 Desember 2017, Jackie Speier mengumumkan bahwa dia sudah menemukan 110 *co-sponsors* (Washington Examiner, 2017). Tidak hanya itu, pemerintah Amerika Serikat di beberapa negara bagian juga sudah mensahkan beberapa RUU yang berhubungan dengan pelecehan seksual dan #MeToo. Contohnya, negara bagian Arizona telah mengesahkan kebijakan baru mereka yakni *Arizona House Bill 2679* mengenai pengurangan ambang ukuran pekerjaan bagi karyawan yang melaporkan atau memberi kesaksian akan kasus pelecehan





seksual ditempat kerja (Arizona Legoslature, 2022). Undang-undang ini diperkenalkan pada 3 Februari 2022, dan disetujui oleh Senator pada 13 April 2022, dan telah ditandatangani untuk dijadikan kebijakan resmi satu minggu kemudian pada 22 April 2022 (Fast Democracy, 2022). Sebelumnya negara bagian Arizona juga telah memiliki undang-undang *Arizona House Bill 2020*. Di mana kebijakan ini mengizinkan individu yang masih terikat oleh *non-disclosure agreement* (kontrak landasan sebuah hubungan professional yang mengikat secara hukum) untuk melanggar NDA jika ditanyai mengenai pelanggaran pidana seks atau selama proses pidana. Dalam undang-undang tersebut juga dijelaskan mengenai pelarangan pejabat publik untuk menggunakan dana publik untuk menyelesaikan permasalahan mengenai NDA yang terkait dengan kekerasan dan pelecehan seksual (Arizona Legislature, 2018). Hal yang sama juga diberlakukan di negara bagian California, di mana dalam undang-undang *Silenced No More Act* dijelaskan bahwa pemberi pekerjaan dilarang untuk menggunakan NDA sebagai bentuk pencegahan karyawan dalam mendiskusikan informasi akan klaim pelecehan atau diskriminasi di tempat kerja terhadap pihak berwajib (California Legislature, 2021).

Kebijakan mengenai pelarangan menggunakan NDA ini juga diberlakukan di negara bagian Hawai'i pada 2020 yang memperluas undang-undang mengenai NDA sebelumnya yang hanya melarang perusahaan untuk mewajibkan karyawan untuk masuk kedalam perjanjian NDA sebagai syarat masuk kerja (Hawai State, 2022). Kebijakan mengenai pelarangan NDA ini sudah diberlakukan di banyak sekali negara bagian lainnya, seperti Maryland, Maine, Louisiana, Nevada, New York, New Jersey, Oregon, New Mexico, Tennessee, Virginia, Vermont, dan Washington D.C.

Di beberapa negara bagian lainnya juga telah diberlakukan kebijakan mengenai pelecehan seksual. Seperti di Delaware, diberlakukan undang-undang untuk memperluas cakupan perlindungan pelecehan seksual bagi karyawan yang mencakup pegawai negeri, pekerja magang yang tidak dibayar, pelamar, pegawai gabungan, serta pekerja magang (Delaware General Assembly, 2018). Selain itu, diberlakukan juga undang-undang yang mewajibkan perusahaan dengan 50 karyawan atau lebih untuk memberikan pelatihan dan pendidikan pencegahan pelecehan seksual secara interaktif kepada karyawan dan supervisor dalam satu tahun sejak





mulai bekerja, dan akan dilakukan kembali setiap dua tahun sesudahnya (Dragoo dan O'Neill, 2018). Undang-undang yang bertujuan untuk melindungi lebih banyak pekerja dari pelecehan seksual ini juga disahkan di Colorado dalam *Colorado Anti-Discrimination Act* (CADA) yang memperluas definisi mereka mengenai karyawan agar mencakup lebih banyak pekerja untuk dilindungi (Colorado General Assembly, 2022). Selain itu, di Connecticut juga memberlakukan hal yang sama ketika memperbarui *Connecticut's Anti-Discrimination Law* yang awalnya hanya melindungi pekerja dengan masa kerja lebih dari 3 bulan, kini bisa melindungi seluruh pekerja tanpa ukuran waktu apapun (Legiscan, 2022). Selain itu, pemerintah negara bagian New York juga telah mengesahkan *Adult Survivor Act* pada awal tahun 2022, undang-undang ini memberikan jangka waktu satu tahun bagi para penyintas pelecehan seksual untuk membuat laporan kepada pihak berwajib mengenai kasus mereka terlepas dari kapan peristiwa pelecehan itu terjadi. Undang-undang ini dipastikan akan berlaku surut, sehingga dapat menghukum pelaku kejahatan seksual yang ada sebelum undang-undang ini berlaku (New York States, 2022). Undang-undang ini diciptakan sebagai bentuk respon pemerintah negara bagian New York untuk memfasilitasi korban pelecehan seksual selain di tempat kerja.

Negara bagian Illinois melalui 'SB 0075 101st *Illinois Human Rights Act, Work Transparency Act*' memberlakukan setiap dan kasino untuk menyediakan *panic button* (tombol panik) sebagai perangkat keselamatan bagi para pekerja mereka, di mana tombol ini bisa digunakan karyawan jika terjadi sebuah kejahatan, kekerasan atau pelecehan seksual, atau keadaan darurat lainnya. Pihak perusahaan juga diwajibkan untuk membuat kebijakan mereka sendiri mengenai anti-pelecehan seksual di tempat kerja, di mana wajib disediakan penugasan sementara dan cuti berbayar pada karyawan yang mengajukan keluhan pelecehan. Undang-undang ini juga sangat menentang adanya pembalasan dari pelaku (Illinois General Assembly, 2019). Selain di Illinois, negara bagian Washington dan New Jersey juga memberlakukan kebijakan yang sama mengenai *panic button*. Pemerintah Washington DC mewajibkan semua hotel, motel, ritel, dan tempat hiburan dewasa untuk menyediakan *panic button* untuk keamanan para pekerja. *House Bill 1756* menetapkan bahwa setiap perusahaan wajib mencatat tuduhan akan pelanggan yang melanggar dan melakukan pelecehan seksual terhadap pekerja serta





menyimpan informasi tersebut selama lima tahun dan melarang pelanggan mereka untuk kembali setidaknya selama tiga tahun (Washington State Legislature, 2019). Sama halnya, di New Jersey, memberlakukan undang-undang yang mewajibkan setiap hotel untuk menyediakan *panic button* di setiap kamar tamu, di mana tombol ini bisa digunakan karyawan jika terjadi sebuah kejahatan, ancaman penyerangan atau pelecehan seksual, atau keadaan darurat lainnya. pada kebijakan ini pihak hotel juga diwajibkan mencatat tamu hotel yang melakukan tindak kekerasan (New Jersey Legislature, 2019). Masih banyak kebijakan-kebijakan lainnya yang sudah ditandatangani oleh gubernur negara bagian di Amerika Serikat sebagai andil dalam memberantas kasus kekerasan dan pelecehan seksual di Amerika Serikat sesuai dengan tujuan gerakan *#MeToo*.

Diciptakannya sistem hukum baru yang melindungi korban dan memberatkan pelaku oleh aktor-aktor yang memiliki *power* ini memperlihatkan bahwa gerakan *#MeToo* berhasil memengaruhi secara material aktor yang kuat dalam sebuah hubungan internasional, baik itu dari sebuah aktor negara maupun aktor non-negara seperti organisasi internasional. Sistem hukum yang baru ini nantinya dapat digunakan sebagai legitimasi bagi korban pelecehan seksual untuk melaporkan pelaku dan memastikan bahwa mereka, sebagai korban, mendapatkan hak mereka untuk dilindungi secara hukum. Sistem hukum tersebut akan menjadi *material leverage* bagi para pelaku di mana sistem hukum ini akan memastikan pelaku mendapatkan sanksi akan perbuatan mereka.

e. Accountability Politics

Accountability politics atau politik akuntabilitas adalah strategi dimana ketika negara, sebagai aktor target telah berkomitmen pada sebuah prinsip (misal mendukung pada sebuah isu seperti hak asasi manusia ataupun demokrasi), jaringan advokasi memiliki peluang politik akuntabilitas yakni dengan menjadi pengamat antara wacana dan praktik dari komitmen tersebut (Keck dan Sikkink, 1999). Tujuan dari strategi ini adalah untuk mengimplementasikan perubahan hukum supaya berjalan sesuai dengan komitmen awal negara sebagai aktor target. Di mana sering terjadi adanya komitmen yang diberikan oleh sebuah negara hanya digunakan sebagai pengalihan isu dari perhatian publik dan jaringan (Keck dan Sikkink, 1999). Maka,





jaringan akan melakukan strategi akuntabilitas politik guna mencegah adanya penyimpangan dari aktor target. Sehingga, aktor target akan tetap melaksanakan komitmen awal yang mereka berikan saat menanggapi isu yang dibawah oleh jaringan advokasi ini.

Gerakan *#MeToo* di Amerika Serikat berhasil memiliki peluang politik akuntabilitas meskipun hanya beberapa undang-undang yang berhasil disahkan oleh senator dan *House of Representative* Amerika Serikat. Namun, setiap negara bagian ikut andil dan berperan menciptakan dan mengesahkan kebijakan mengenai kekerasan dan pelecehan seksual di wilayah mereka. Meskipun tidak sepenuhnya memiliki peluang politik akuntabilitas, gerakan *#MeToo* berhasil mengesahkan puluhan hingga ratusan RUU untuk dilakukan voting. Beberapa negara bagian juga telah ikut andil mengesahkan kebijakan baru mereka untuk merespon isu kasus pelecehan seksual yang dibawa oleh gerakan *#MeToo*. Sesuai dengan yang telah dijelaskan pada bagian *Leverage Politics*, bahwa belasan hingga puluhan negara bagian telah mengesahkan undang-undang mereka guna melindungi korban dan memberatkan pelaku kekerasan dan pelecehan seksual.

Dari empat taktik atau strategi yang telah dijelaskan Keck dan Sikkink, gerakan *#MeToo* berhasil memperlihatkan bagaimana upaya mereka dalam mengadvokasi isu pelecehan seksual ini guna mencapai tujuan utama dari gerakan advokasi. Keberhasilan dari sebuah jaringan advokasi dalam mempengaruhi kebijakan aktor target tergantung pada kekuatan dan kepadatan jaringan, serta bagaimana kemampuan jaringan dalam mencapai pengaruh. Dalam kasus ini pencapaian gerakan *#MeToo* untuk memengaruhi kebijakan mengenai pelecehan seksual di Amerika Serikat telah berhasil dicapai dengan adanya pendorong yakni *Boomerang Pattern* dan empat strategi atau taktik yang telah diterapkan oleh gerakan *#MeToo*.

Penutup

Gerakan *#MeToo* muncul dengan permulaan sebagai sebuah gerakan yang mendukung korban pelecehan seksual dan perempuan berwarna untuk mendapatkan kembali hak dan hidup mereka. Gerakan ini berkembang dari gerakan domestik yang berjalan Amerika Serikat saja menjadi gerakan internasional. Sejak berkembang menjadi gerakan internasional, gerakan





#MeToo berhasil memberikan dampak domestik diberbagai sektor, baik sektor hiburan seperti perfilman dan televisi, sektor pekerjaan atau perkantoran, dan bahkan sektor politik.

Faktor pendorong kemunculan aktivisme gerakan #MeToo ini adalah *boomerang pattern*. *Boomerang pattern* dalam permasalahan ini memiliki peran besar untuk mendorong pemerintah Amerika Serikat untuk memastikan komitmen mereka dalam penanganan kasus pelecehan seksual dengan mengubah kebijakan mereka. Bantuan dan simpati dari organisasi internasional serta gerakan gerakan domestik memberikan peran besar dalam menekan pemerintah Amerika Serikat. Di lain sisi, untuk menganalisa upaya gerakan #MeToo guna mencapai tujuan gerakan #MeToo dalam mencapai perubahan kebijakan diidentifikasi dengan empat taktik atau strategi yang dijelaskan oleh Kick dan Sikkink yakni *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics*, dan *accountability politics*.

Dalam Penelitian ini, peneliti berhasil menyimpulkan bahwa dengan menjalankan empat taktik yang dijelaskan oleh Keck dan Sikkink maka terlihat bahwa pencapaian gerakan #MeToo untuk mengubah kebijakan mengenai pelecehan seksual di Amerika Serikat ini telah berhasil. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa gerakan #MeToo ini berhasil membawa pengaruh bahkan sampai pada sektor politik yakni mampu mendorong pemerintah untuk mengubah kebijakan mereka. Keberhasilan ini tidak lain dan tidak bukan berkat dari peran semua aktor yang terlibat baik aktor domestik maupun aktor internasional sebagai pendorong keberhasilan.

Hal yang dapat diambil dari gerakan #MeToo yakni bagaimana sebuah gerakan jaringan advokasi seperti gerakan #MeToo ini mampu mendorong aktor dengan *power* yang sangat kuat yakni pemerintah dengan kepercayaan dan kekuatan bersama yang dilakukan oleh aktivis jaringan. Keberhasilan gerakan ini menunjukkan bahwa untuk mencapai sebuah tujuan besar dibutuhkan rasa saling percaya dan keyakinan yang selaras antar aktor yang sama besarnya. Diperlukan juga strategi yang tepat serta upaya yang kuat dari sebuah gerakan untuk memengaruhi sebuah institusi yang besar. Keberhasilan gerakan #MeToo ini dapat tercapai tidak hanya karena peran gerakan jaringan advokasi internasional saja namun juga gerakan domestik, aktivis internasional, organisasi internasional, dan tak luput juga peran dari setiap individu di jaringan.





Gerakan #MeToo ini memperlihatkan bagaimana ketika perempuan tidak pernah berhenti dan terus berupaya untuk mendapatkan hak mereka untuk bisa hidup bebas tanpa perlu ketakutan akan serangan pelecehan seksual yang bisa menimpa mereka kapan saja iniakhirnya membuahkan hasil. Dengan disahkannya kebijakan baru mengenai pelecehan seksual ini dapat menjadi landasan bagi korban pelecehan agar bisa menuntut hak mereka untuk mendapatkan perlindungan dan menghukum pelaku.

Daftar Pustaka

- Arizona Legislature. 2022. "House Bill 2679". <https://www.azleg.gov/legtext/55Leg/2R/laws/0169.pdf>.
- Arizona Legislature. 2018. "House Bill 2020". <https://www.azleg.gov/legtext/3leg/2R/bills/hb2020s.pdf>.
- Baachi, Umberto. Reuters. 2018. "U.N. Agencies Vow to Ramp Up Fight Against Sexual Harassment". <https://www.reuters.com/article/us-global-un-harassment/u-n-agencies-vow-to-ramp-up-fight-against-sexual-harassment-idUSKBN1FK1YY>
- BBC. 2018. "Time's Up: Women Launch Campaign to Fight Sexual Harassment". <https://www.bbc.com/news/world-us-canada-42534124>.
- Berry, Deborah B. USA Today. 2017. "House Approves Mandatory Sexual Harassment Training, Some Pushing Broader Reforms". <https://www.usatoday.com/story/news/politics/2017/11/29/house-set-vote-mandatory-sexual-harassment-training-some-push-but-doesnt-yet-address-complaint-process/905289001/>
- Biography. 2018. "Tarana Burke Biography". <https://www.biography.com/activist/tarana-burke>.
- Boyle, Karen. 2019. #MeToo, Weinstein and Feminism. Gasglow, UK: Palgrave Macmillan.
- Buxton, Madeline. REFINERY29. 2019. "With Me Too Rising, Google Maps the Spread of a Movement". <https://www.refinery29.com/en-us/2018/04/196748/me-too-google>
- California Legislative Information. 2021. "SB-331 Settlement and Non-disparagement Agreements". https://leginfo.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=202120220S B331.
- Delaware General Assembly. 2018. "House Bill 360 149th General Assembly". <https://legis.delaware.gov/billdetail/26453>.
- Dogantekin, Vakkas. AA. 2019. "Kekerasan Seksual di AS dan Eropa Terus Meningkat". <https://www.aa.com.tr/id/dunia/kekerasan-seksual-di-as-dan-eropa-terus-meningkat/1401287#>





- Dragoo, Marissa L. Kevin P. O'Neill. SHRM. "Delaware Mandates Sexual-Harassment Training". <https://www.shrm.org/resourcesandtools/legal-and-compliance/state-and-local-updates/pages/delaware-mandates-sexual-harassment-training.aspx>
- Congress.gov. 2017. "H.R.4396 – METOO Congress Act". <https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/4396/all-actions?overview=closed#tabs>.
- Congress.Gov. 2021. "H.R.4445 - Ending Forced Arbitration of Sexual Assault and Sexual Harassment Act of 2021". <https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/4445>
- Creswell, John W. 2013. *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. California, USA: SAGE Publications.
- Delaware General Assembly. 2018. "House Bill 360 149th General Assembly". <https://legis.delaware.gov/billdetail/26453>.
- Farrow, Ronan. The New Yorker. 2017. "Weighing the Costs of Speaking Out About Harvey Weinstein". <https://www.newyorker.com/news/news-desk/weighing-the-costs-of-speaking-out-about-harvey-weinstein>
- Fast Democracy. 2022. "HB 2679: Arizona House Bill (55th Legislature 2nd Regular Session)". <https://fastdemocracy.com/bill-search/az/55th-2nd-regular/bills/AZB00014257/>.
- GovTrack. 2018. "S.3749 (115TH): Congressional Accountability Act of 1995 Reform Act". <https://www.govtrack.us/congress/bills/115/s3749>.
- GovTrack. 2019. "H.R. 2148 (116th): BE HEARD in the Workplace Act". <https://www.govtrack.us/congress/bills/116/hr2148>.
- Gupta, Rajiv., Gupta, Arunima., Nehra, Dharmender. 2019. "Going Forward with #MeToo Movement: Towards a Safer Work Environment". *Journal of Psychosexual Health*. Vol. 1. No. 2. Hal. 174-179.
- Hawai'i State Legislature. 2022. "HB2495 HD1 SD1". https://www.capitol.hawaii.gov/session/archives/measure_indiv_Archives.aspx?billtype=HB&billnumber=2495&year=2022.
- Helmore, Edward. The Guardian. 2018. "Time's Up: Hollywood Women Launch Campaign to Fight Sexual Harassment". <https://www.theguardian.com/world/2018/jan/01/times-up-hollywood-women-launch-campaign-to-fight-sexual-harassment>
- Heminaway, Joan Macleod. 2019. "Me, Too and #MeToo: Women in Congress and the Boardroom". *George Washington Law Review*. Vol. 87. No. 5. Hal 1079-1094.
- Illinois General Assembly. 2018. "HB 0138 100th General Assembly". <https://www.ilga.gov/legislation/billstatus.asp?DocNum=0138&GAID=14&GA=100&DocTypeID=HB&LegID=99088&SessionID=91&SpecSess=>
- Instagram. 2023. <https://www.instagram.com/metoomvmt/>





- International Labour Organization. 2019. “*Standard-Setting Committee: Violence and Harassment in the World of Work - Background Information*”. <https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/committees/violence-harassment/WCMS681754/lang--en/index.htm>.
- International Labour Organization. 2019. “*New International Labour Standard to Combat Violence, Harassment, at Work Agreed*”. <https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/media-centre/news/WCMS711321/lang--en/index.htm>
- Italie, Leanne. The Globe and Mail. 2018. “Stars Wear Black to Golden Globes in Statement against Sexual Harassment, Gender Inequality”. <https://www.theglobeandmail.com/arts/awards-and-festivals/stars-wear-black-to-golden-globes-in-statement-against-sexual-harassment-gender-inequality/article37521735/>
- Jumabhoy, Fatih dkk. Herbert Smith Freehills. 2019. “*South Korea: Changes to Workplace Bullying and Harassment Legislation*”. <https://hsfnotes.com/employment/2019/04/29/south-korea-changes-to-workplace-bullying-and-harassment-legislation/#page=1>
- Keck, Margaret E., Sikkink, K. 1999. “Transnational Advocacy Networks in International and Regional Politics”. *International Social Science Journal*. Vol. 51. No. 159. Hal 89-101.
- Kantor, Jodi. Abrams, Rachel. The New York Times. 2017. “*Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie and Others Say Weinstein Harassed Them*”. <https://www.nytimes.com/2017/10/10/us/gwyneth-paltrow-angelina-jolie-harvey-weinstein.html>
- Karni, Annie. The New York Times. 2022. “*Congress Approves Bill to Nullify Forced Arbitration in Sex Abuse Cases*”. <https://www.nytimes.com/2022/02/10/us/politics/senate-bill-forced-arbitration-sexual-harassment-as-sault.html>
- Kiel, Christina. 2011. “How Transnational Advocacy Networks Mobilize Applying the Literature on Interest Groups to International Action”. *Josef Korbel Journal of Advanced International Studies*. Summer 2011. Hal 77-101.
- Lang, Cady. TIME. 2018. “*See Every Black Dress on thr Red Carpet at the 2018 Golden Globes*”. <https://time.com/5086813/golden-globes-red-carpet-2018/>
- Legiscan. 2022. “*Connecticut Senate Bill 5 (Prior Session Legislation)*”. <https://legiscan.com/CT/bill/SB00005/2022>.
- MacKinnon, Catharine A. The Atlantic. 2019. “*Where #MeToo Came From, and Where It’s Going*”. <https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2019/03/catharine-mackinnon-what-metoo-has-changed/585313/>
- Metoo. 2021. “Annual Report 2020 & 2021”. <https://metoomvmt.org/annual-report/>.
- Metoo. 2023. “History and Inception”. <https://metoomvmt.org/get-to-know-us/history-inception/>.





- Metoo. 2022. "Metoo; Vision & Theory of Change". <https://metoomvmt.org/get-to-know-us/vision-theory-of-change/>.
- Me Too Rising*. 2023. <https://metoorising.withgoogle.com/>
- National Sexual Violence Resource Center (NSVRC). 2022. "NSVRC: Statistics". <https://www.nsvrc.org/statistics>
- New Jersey Legislature. 2019. "Bill S2986 ScaAa (2R)". <https://www.njleg.state.nj.us/bill-search/2018/S2986>
- New York States. 2022. "Governor Hochul Signs Adult Survivors Act". <https://www.governor.ny.gov/news/governor-hochul-signs-adult-survivors-act>.
- Rahagi, Raditya, Ramadhan, Krisna A., Werdana, Andika T. 2019. "Gerakan #MeToo Movement Dalam Mempengaruhi Kebijakan di Amerika Serikat". Tesis. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- RAINN. 2022. "Scope of the Problem: Statistics". <https://www.rainn.org/statistics/scope-problem>.
- RAINN. 2022. "The Criminal Justice System: Statistics". <https://www.rainn.org/statistics/criminal-justice-system>.
- Rosewarne, Lauren. 2019. *#MeToo and the Reasons to Be Cautious*. in *#MeToo and the Politics of Social Change*. Australia: Palgrave Macmillan.
- Rothman, Michael. Messer, Lesley. abc News. 2017. "Annabella Sciorra and Daryl Hannah Join Dozens Making Accusations against Harvey Weinstein". <https://abcnews.go.com/Entertainment/accusers-share-stories-harvey-weinsteins-alleged-advances/story?id=50398447>
- Siegel, R. B. 2003. "Introduction: A Short History of Sexual Harassment". Dalam C. A. Mackinnon, & R. B. Siegel, *Directions in Sexual Harassment Law*. New Haven, USA: Yale University Press Scholarship.
- Stone, Meighan, Vogelstein, Rachel. Foreign Policy. 2019. "International Women's Day; Celebrating #MeToo Global Impact". <https://foreignpolicy.com/2019/03/07/metoo-global-impact-international-womens-day/>
- The Guardian. 2022. "US Congress Approves Sexual Harassment Bill in #MeToo Milestone". <https://www.theguardian.com/us-news/2022/feb/10/us-congress-sexual-harassment-metoo>
- Vogelstein, Rachel B., Stone, Meighan. 2021. *AWAKENING #MeToo and the Global Fight for Women's Rights*. New York, USA: Hachette Book Group.
- Washington Examiner. 2017. "Jackie Speier Finds 110 Cosponsors for Me Too Congress Act". <https://www.washingtonexaminer.com/jackie-speier-finds-110-cosponsors-for-me-too-congress-act>.





Washington State Legislature. 2019. “HB 1756 – 2019 – 20”.

<https://app.leg.wa.gov/billsummary?BillNumber=1756&Year=2019>

Zippel, K. 2006. “Equality Through Litigation: Sexual Harassment in The United States”. Dalam K. Zippel, *The Politics odd Sexual Harassment: A Comparative Study of the United States, the European Union, and Germany*. Cambridge: Cambridge University Press

